

40 Caleg DPRD Karo Terpilih Periode 2024-2029 Belum Melaporkan Harta Kekayaan

Anita Manua - KARO.INDONESIASATU.ID

Jun 2, 2024 - 01:15



1. Heppi Karo-Karo (PDIP): 3.250 suara
2. Korindo S Milala (Gerindra): 4.892 suara
3. Imanuel Sembiring (NasDem): 4.235 suara
4. Pujiati Br Ginting (PDIP): 3.096 suara
5. Monang Sitanggang (Gelora): 1.715 suara

Caleg DPRD Karo Terpilih Periode 2024-2029

KARO - Empat puluh calon legislatif (Caleg) DPRD Karo terpilih periode 2024-2029, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 937 Tahun 2024, seluruhnya belum menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Hal tersebut dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo Hendra Lias Sinulingga selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Selasa (28/05-2024) melalui sambungan telepon seluler.



Dapil Karo IV (8 kursi)



1. Feri Edisonta Milala (PDIP): 4.589 suara
2. Etrif Bepura Tarigan (Gelora): 3.189
3. Lusia Sukatendel (PDIP): 3.764 suara
4. Inolia Br Ginting (Gerindra): 3.667 suara
5. Hendri Mayanta Tarigan (NasDem): 4.025 suara
6. Jujur Sinulingga (PKB): 3.148 suara
7. Raja Urung Mahesa Tarigan (Demokrat): 2.865 suara
8. Holmes Bangun (PDIP): 3.213 suara

"Hingga saat ini, belum ada laporan terkait penyampaian laporan harta kekayaan

pejabat negara (LHKPN) ke pihak kami. Seluruh politisi atau 40 caleg terpilih yang telah ditetapkan, belum menyerahkan LHKPNnya masing-masing," ujarnya.

Ia mengingatkan, jika ada caleg yang sudah menyampaikan LHKPN kepada KPK agar melaporkan kepada KPU Karo. Sebab laporan tersebut sangat dibutuhkan, agar tidak dikenakan sanksi berupa tidak didaftarkan sebagai caleg terpilih sehingga tidak dapat dilantik.

Dapil Karo III (8 kursi)



1. Iriani Br Tarigan (PDIP): 4.998 suara
2. Vera Rika Br Matondang (Golkar): 3.908 suara
3. Dharma Elfrishon Situmorang (Gelora): 4.390 suara
4. H. Yudi Yahya Ginting (Gerindra): 3.529 suara
5. Riki Rikardo Nainggolan (PKB): 3.069
6. M. Rapi Ginting (PAN): 2.609 suara
7. Endamia Carolina Kaban (Demokrat): 2.212

"Mungkin juga sudah ada yang melaporkan LHKPN periodik tahun 2023, tapi belum sampai ke kami. Meskipun begitu, waktunya masih panjang. Ini kan bulan Mei, pelantikan diperkirakan bulan Oktober nanti," sebut Hendra Lias Sinulingga.

Dikatakannya lagi, bukti caleg jika sudah menyampaikan LHKPN kepada KPK harus diserahkan kepada KPU. Jajarannya sudah mendorong para caleg terpilih untuk segera menyampaikan LHKPN melalui surat ke partainya masing-masing.

Sekedar diketahui, sebagai pejabat negara, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terikat dengan hak dan kewajiban. Salah satunya menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dapil Karo II (9 kursi)



1. Mathius Hernandez Bukit (PDIP): 6.681 suara
2. Davit Kristian Sitepu (NasDem): 6.049 suara
3. Rina Br Sebayang (Gerindra): 3.357 suara
4. Firman Firdaus Sitepu (Golkar): 3.192 suara
5. Perdata Ginting (Hanura): 3.847 suara
6. Eldy Corona Barus (PDIP): 4.969 suara
7. Abdi S Depari (PAN): 3.463 suara
8. Romanus Ginting (Perindo): 2.392 suara

Di Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan semua calon anggota legislatif terpilih untuk menyampaikan LHKPN. Laporan tersebut bahkan menjadi salah satu syarat dalam pengusulan pelantikan caleg terpilih.

Dalam Pasal 46 rancangan PKPU diatur, calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa LHKPN. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan ke KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Dapil Karo I (7 kursi)



1. Suriyadi Purba (PDIP): 4.320 suara
 2. Sadarta Bukit (Gerindra): 3.970 suara
 3. Mansur Ginting (Demokrat): 2.249 suara
 4. Ferianta Purba (Golkar): 3.180 suara
-

Jika calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU tidak mencantumkan nama caleg dalam pengusulan nama calon terpilih.

Hasil pemilu harus mendukung pemerintahan yang bersih, indikatornya adalah keterbukaan.

(Anita Theresia Manua)